

Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

¹Maretta Ayu Rahmawati, ²Anggi Krisnawati, ³Savinathul Nadzah, ⁴Nanda Putri Widianti, ⁵Harun Ar-Rasyid Utomo

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

¹ marettaayu533@gmail.com, ² anggiikrisna@gmail.com, ³ Vinaandz21@gmail.com,

⁴ nandaa.widiantii@gmail.com, ⁵ 21013010070@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the Village Financial System Application (SISKEUDES) in Tebel Village, Gedangan District, Sidoarjo Regency, to improve village financial accountability. Effective financial management is crucial to achieving transparency. SISKEUDES, developed by BPKP, aims to support villages in managing finances more efficiently and effectively. The approach used in this study is qualitative with interview techniques of resource persons. The results show that the implementation of SISKEUDES in Tebel Village contributes positively to accountability and transparency, but this success is influenced by factors such as the adequacy of human resources, effective communication, and bureaucratic support. Challenges include a lack of understanding and training for village officials. Overall, SISKEUDES has proven to be effective in improving village financial governance. Overall, SISKEUDES has proven to be effective in improving village financial governance. This research is expected to provide insights for the development of village financial policies in the future and become a reference for other villages in utilizing information technology to increase accountability and transparency.

Keywords: Implementation, SISKEUDES, Village Finance, Accountability, Sidoarjo Regency

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang efektif sangat krusial untuk mencapai transparansi. SISKEUDES, yang dikembangkan oleh BPKP, bertujuan untuk mendukung desa dalam mengelola keuangan secara lebih efisien dan efektif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik wawancara narasumber. Hasil menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES di Desa Tebel berkontribusi positif terhadap akuntabilitas dan transparansi, namun keberhasilan ini dipengaruhi oleh faktor seperti kecukupan sumber daya manusia, komunikasi yang efektif, dan dukungan birokrasi. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman dan pelatihan untuk aparat desa. Secara keseluruhan, SISKEUDES terbukti efektif dalam memperbaiki tata kelola keuangan desa. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan untuk pengembangan kebijakan keuangan desa di masa depan dan menjadi referensi bagi desa lain dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci: Implementasi, SISKEUDES, Keuangan desa, Akuntabilitas, Kabupaten Sidoarjo

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan yang transparan dan akuntabel bergantung pada pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan otoritas yang lebih besar kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri. Tentunya ada tantangan yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa. Tantangan tersebut berkaitan dengan kurangnya sistem yang terstruktur dan kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan secara profesional. Karena itu, kita memerlukan adanya inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Proses dalam mengelola dana desa perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip yang berlaku umum seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif dari pihak yang berwenang untuk mengelola. Oleh karenanya, BPKP dan juga pemerintah yang berwenang dalam hal ini Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, membuat sebuah hubungan kerja sama yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi pengelolaan dana desa yang terotomatisasi sehingga memudahkan proses penganggaran dan juga pelaporan. Di mana aplikasi ini dikenal dengan nama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) hadir sebagai solusi untuk membantu desa dalam mengatur keuangannya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aplikasi ini juga berfungsi untuk mempermudah pemerintah desa dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan keuangan desa dengan lebih baik. Diketahui sebelumnya bahwa pencatatan akuntansi atas transaksi dan pengadministrasian yang terjadi di Desa Tebel masih dilakukan secara manual. SISKEUDES telah terbukti berhasil meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di banyak desa di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan sistem keuangan desa. Menurut (Rivan & Maksum, 2019) hal utama yang menjadi faktor dalam keberhasilan penggunaan aplikasi ini adalah tenaga ahlinya atau sumber daya manusianya, di mana pada beberapa wilayah desa SDMnya tentu belum mencukupi kualifikasi sebagai tenaga ahli yang dapat mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Oleh karenanya, penggunaan sistem ini perlu didampingi program pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas dari SDM yang ada. Dalam penelitiannya, (Maharani & Akbar, 2020) kaur keuangan desa sangat terbantu dengan SISKEUDES dalam proses pengelolaan keuangannya. Selain itu, SISKEUDES juga membantu untuk menciptakan laporan keuangan tepat sesuai dengan waktu yang diharapkan. Tahapan awal yang perlu dilakukan saat mengoperasikan aplikasi ini adalah memasukkan data-data umum desa, kemudian rencana program kerja, penganggaran dana desa selama tahun berjalan, selanjutnya penatausahaan, sampai laporan yang ada pada aplikasi tersebut sudah siap digunakan sebagai informasi yang memiliki kredibilitas. Beberapa hal tersebut bisa langsung dikerjakan pada satu kali proses di awal agar dapat memudahkan kinerja pegawai yang bertugas. Artikel ini berisi tentang identifikasi terkait tahapan teknis penggunaan aplikasi, mulai dari input data hingga pembuatan laporan keuangan.

Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Tebel sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas sejauh mana penerapan SISKEUDES mampu memperbaiki tata kelola keuangan desa serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai manfaat dan kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi di tingkat pemerintahan desa.

TINJAUAN TEORITIS

Dalam upaya meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Melalui kerja sama dengan KPK, penerapan SISKEUDES secara menyeluruh terus didorong. BPKP juga melibatkan perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam upaya sosialisasi dan implementasi aplikasi ini. Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) sendiri adalah sistem

yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan keuangan di tingkat desa. Dengan Siskeudes, pengelolaan anggaran, penerimaan, dan pengeluaran dapat dilakukan secara terintegrasi, yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Aplikasi ini juga membantu desa dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini disampaikan berbagai macam hasil dan pembahasan yang beragam sesuai dengan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Berikut merupakan ringkasan dari beberapa sumber artikel terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan artikel ini.

Artikel pertama yang digunakan sebagai acuan membahas terkait dengan penerapan aplikasi keuangan desa yang biasa disebut dengan Siskeudes versi 2.0. Di mana metode penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan tujuh informan penelitian dalam melakukan observasi dan wawancara. Melalui penelitian yang dilakukan tersebut, hasil kesimpulan yang didapatkan adalah implementasi aplikasi SISKEUDES di desa yang bersangkutan dianggap kurang efektif dilihat dari penggunaan model Edward III pada indikator sumber daya yang dinilai masih rendah, mulai dari sumber daya manusia yang masih belum cukup memahami terkait cara mengoperasikan aplikasi SISKEUDES, kemudian sarana dan prasarana yang kurang maksimal untuk mendukung adanya aplikasi SISKEUDES. Selain itu, pada indikator disposisi juga dinilai kurang efektif karena kinerja dari aparatur yang bertugas mengoperasikan aplikasi SISKEUDES dianggap belum sepenuhnya kompeten dalam bidang teknologi informasi dan komputer. Hal ini juga menjadi alasan bagi Desa Guru Agung 1 untuk mengalih tugaskan proses operasional aplikasi SISKEUDES ke orang yang lebih memahami teknologi tersebut. Kemudian, dilihat dari indikator struktur birokrasi juga dianggap belum maksimal karena tugas terkait keuangan desa sepenuhnya diserahkan kepada bendahara. Tetapi dari kepala desanya sendiri dirasa kurang peduli kepada bawahannya karena tidak melakukan koordinasi mengenai pengelolaan keuangan dengan bendahara (Wibowo et al., 2020).

Artikel kedua yang digunakan sebagai landasan atau acuan penelitian ini juga membahas mengenai implementasi sistem keuangan desa. Dimana artikel ini memiliki konsep penelitian dengan pendekatan kualitatif dan pemilihan informan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan aplikasi keuangan desa

masih belum efektif, meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Beberapa indikator yang dinilai masih memiliki kekurangan atau masalahnya masing-masing. Mulai dari masalah yang berkaitan dengan sumber daya yang mendukung diterapkannya aplikasi keuangan desa ini. Selain itu, ketidakefektifan kinerja aparatur dalam mengoperasikan aplikasi karena kurangnya kompetensi dalam bidang tersebut. Oleh karenanya, masih diperlukan tahapan evaluasi terkait implementasi aplikasi SISKEUDES pada pemerintah Desa Telukjambe. (Ramadhan & Priyanti, 2022).

Artikel ketiga pada landasan teoritis ini membahas mengenai evaluasi dari pengimplementasian Siskeudes secara online. Hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai temuan mengenai penerapan aplikasi SISKEUDES. Di Kabupaten Pati, komunikasi mengenai implementasi SISKEUDES secara online dianggap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini direalisasikan dengan adanya kegiatan bimtek yang diselenggarakan di tingkat kabupaten, yang kemudian diteruskan ke setiap kecamatan untuk memberikan pelatihan kepada para aparatur pemerintah yang bertugas mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Selain itu, dari segi sumber daya, dapat dikatakan bahwa kondisi yang ada cukup optimal, mengingat Kabupaten Pati telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana, termasuk server berkapasitas besar yang berfungsi sebagai wadah arsip laporan keuangan desa. Implementasi aplikasi ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan hasil capaian output keuangan desa berjalan dengan lancar, tanpa adanya kendala signifikan yang dapat mempengaruhi kredibilitas laporan yang dihasilkan, mulai dari proses input hingga output (Wijayandanu & Astuti, 2020).

Artikel keempat ini juga sama halnya dengan artikel sebelumnya yang membahas terkait evaluasi penerapan aplikasi siskeudes dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ada di desa. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Data didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber, yang selanjutnya akan dianalisis melalui beberapa tahapan. Terkait pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Jenetallasa, proses penginputan dan pelaporan dilakukan dengan semestinya. Desa ini menerapkan struktur yang teratur dalam menjalankan aplikasi tersebut. Desa Jenetallasa menunjukkan prinsip kepatuhan dan ketelitian pada proses

penerapan SISKEUDES dan juga sikap adil dalam menyampaikan informasi. Hal ini berkontribusi pada kelancaran seluruh proses, dan penerapan aplikasi Siskeudes terbukti efektif untuk meningkatkan sikap pertanggungjawaban pada pemerintahan desa dalam hal pengelolaan keuangan. Setelah mengoperasikan sistem ini, memberikan tambahan kredibilitas pada laporan keuangan yang dihasilkan. Aplikasi ini mempermudah pencatatan penggunaan dana desa dan mampu menciptakan perolehan yang signifikan dalam peningkatan kualitas desa. (Juardi et al., 2019).

Artikel kelima ini membahas mengenai analisis dari pengimplementasian aplikasi sistem keuangan desa dalam mengelola dana yang ada pada desa tersebut. Artikel ini menerapkan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dalam proses penelitiannya dengan melakukan tahapan wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan. Kemudian, analisis data dari hasil wawancara akan diproses dengan beberapa tahapan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, hasil yang diperoleh yaitu penerapan aplikasi sistem keuangan desa sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Prosedur pengelolaan keuangan mencakup tahapan siklus APBD pada umumnya. Meskipun demikian, pada penerapannya terdeteksi beberapa kendala yang tidak signifikan, seperti adanya error pada sistem saat digunakan, yang dapat menghambat proses penginputan data. Sistem keuangan desa memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan. (Faizah & Sari, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data yang lebih mendalam. (Sugiyono, 2022. Hal.9). Teknik penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah wawancara. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. Wawancara dilakukan pada 3 narasumber yaitu, Sekretaris Desa Tebel yaitu Bapak Radian Kholik, Bendahara Desa Tebel yaitu Ibu Dewi Krisnawati, S.T, dan Kaur Perencanaan Desa Tebel yaitu Ibu Reina Liesjayanti, S.Ap. Penelitian ini mengadopsi

pendekatan kualitatif untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi aplikasi SISKEUDES dan bagaimana hal ini mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transparansi pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan saat ini merupakan topik yang penting untuk diperhatikan oleh negara. Hal ini menjadi landasan untuk ditetapkannya peraturan yang menuntut pemerintahan desa di Indonesia untuk memberikan kinerja dengan mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa untuk kesejahteraan daerahnya. Terkait adanya tuntutan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, untuk itu pemerintah memperkenalkan Aplikasi Siskeudes sebagai bentuk implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) merupakan sebuah sistem yang digunakan pemerintah desa dalam melaporkan informasi keuangan desa. Dalam implementasi terdapat hambatan yang diperoleh. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji, mengevaluasi implementasi serta pemanfaatan aplikasi Siskeudes di kantor Desa Tebel, Kabupaten Sidoarjo, dengan konsep implementasi Edward III. Terdapat empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi Dalam Aplikasi SISKEUDES

Aspek komunikasi yang baik antara bawahan maupun atasan penting dalam menjalankan implementasi aplikasi Siskeudes. Komunikasi yang tidak efisien dalam penyampaian informasi keuangan dapat membuat pengelola kepentingan mengabaikan informasi penting serta menyulitkan dalam mengenali keterkaitan antara berbagai elemen informasi di berbagai aspek keuangan. Jika komunikasi berjalan dengan efektif maka informasi keuangan dapat tersampaikan dengan baik dan tahapan manajemen keuangan dapat berjalan dengan efektif (Ramadhan & Priyanti, 2022).

Penting untuk memperhatikan aspek komunikasi dalam implementasi aplikasi Siskeudes karena koordinasi antara pihak desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat

dibutuhkan terkait menentukan atau adanya perubahan APBDes, selain dengan Badan Permasyarakatan Desa komunikasi antar *stakeholders* juga diperlukan.

“Untuk pembahasan dana desa kita melalui banyak proses. Dan setiap ada kegiatan tentang keuangan desa mulai dari penyusunan APBDes, RKP (Rencana kerja pemerintahan desa), PAK (Perubahan anggaran keuangan) itu selalu melihatkan BPD dalam penyusunannya, lebih ke rapat internal. seperti contoh kita terakhir ada rapat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) dengan BPD, jadi anggaran-anggaran itu kita rapatkan dulu secara transparan kepada semua pemdes dan BPD.”

Dari penjelasan dari salah satu staff tersebut dapat disimpulkan komunikasi dengan BPD berjalan dengan baik dimana dalam adanya hal terkait keuangan berkomunikasi langsung dengan Badan Permasyarakatan Desa. Akan tetapi Dusun Tebel masih belum melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam menetapkan anggaran APBDes seperti menerima masukan dari para warga terkait adanya kendala yang dialami baik dari segi ketahanan pangan maupun pembangunan fisik.

Komunikasi antar stakeholder terlebih kepala desa, staff yang berwenang mengoperasikan siskeudes, dan BPD telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dikarenakan setiap akan mengajukan anggaran untuk tahun anggaran selanjutnya koordinasi antara staff dengan BPD selalu dilakukan dengan mengajukan program-program yang akan dijalankan pada tahun anggaran berikutnya.

Komunikasi yang baik terutama untuk kaur keuangan, kaur perencanaan dan kepala desa diperlukan hal tersebut dikarenakan mereka bertugas dan memiliki akses dalam mengimplementasikan aplikasi Siskeudes. Selain itu dalam aplikasi Siskeudes terdapat banyak unsur yang perlu diisi, sehingga komunikasi yang baik diperlukan agar tidak terjadi perbedaan informasi (Wibowo et al., 2020). Karena itu, dalam model implementasi Edward III, pada dimensi komunikasi menjadi salah satu indikator kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan penerapan dari kebijakan maupun program pemerintah.

Adanya komunikasi yang baik dapat merepresentasikan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikaitkan dengan akuntabilitas yang ditunjukkan desa tebel dengan selalu tepat waktu membuat laporan keuangan yang dikomunikasikan dengan baik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa atas pengelolaan keuangan yang

ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu prinsip transparansi juga diterapkan desa tebal dengan selalu membuat *banner x* berisi laporan realisasi anggaran desa dan APBDes Desa Tebel yang ditempatkan di ruang pelayanan publik Balai Desa Tebel sehingga masyarakat desa dapat memantau penggunaan dana desa yang dikelola oleh pejabat daerah.



Gambar 1 Banner APBDes Tebel

2. Sumber Daya Dalam Aplikasi SISKEUDES

Pelaksanaan manajemen organisasi juga dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya. Barney (1991) mengategorikan 3 tipe sumber daya: sumber daya dalam bentuk fisik (perlengkapan dan peralatan yang mendukung dan teknologi), sumber daya organisasional (struktur organisasi resmi), dan sumber daya manusia (pengetahuan, pengalaman, keahlian).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengharuskan pengelolaan desa menggunakan aplikasi Siskeudes. Di mana dengan adanya peraturan tersebut mengharuskan perangkat desa menggunakan aplikasi tersebut dalam mengajukan serta melaporkan keuangan desa. Siskeudes sendiri sangat membantu pemerintah desa terkait pencatatan keuangan desa dengan cara melaporkan dana yang digunakan ke dalam aplikasi tersebut, yang mampu digunakan dalam keadaan luring maupun daring, serta terdapat banyak modul yang tersedia di internet terkait penggunaan aplikasi siskeudes, siskeudes mampu menghasilkan laporan yang akurat dan efisien dan alat yang ada dalam aplikasi siskeudes termasuk user friendly (Ramadhan & Priyanti, 2022). Banyaknya keunggulan yang dapat dirasakan dari aplikasi siskeudes tidak menutup kemungkinan adanya kekurangannya yaitu sering terjadi lambat saat menginput data ke aplikasi.

“eror tidak juga cuman dia butuh koneksi yang kuat, jika eror itu biasanya waktu penyusunan APBDes di akhir tahun itu lama banget.”

Sesuai penuturan tersebut aplikasi SISKEUDES terjadi eror hanya pada saat waktu penyusunan APBDes pada akhir tahun.

“Untuk aplikasi siskeudes ini jadi tupoksinya kaur perencanaan sama bendahara saja, jadi yang bisa akses dan mengoperasikannya cuma mereka, Untuk sarana dan prasarana baik karena kaur perencanaan dan bendahara mempunyai komputer yang support dengan aplikasi SISKEUDES”

Walaupun sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES Desa Tebel juga perlu membuat Surat Pertanggungjawaban secara hard file, hal tersebut dikarenakan Siskeudes hanya bisa menginput nominal saja sehingga perlu adanya SPJ yang melampirkan bukti kegiatan, nota pembelian, daftar hadir warga dalam kegiatan.

“Laporan bisa dilihat di siskeudes dan sudah otomatisasi di website tersebut. Mulai dari anggaran awal, pertanggungjawaban. Sayangnya untuk penggunaan dana tidak dilampiri bukti/nota transaksi jadi hanya berupa nominal. Tapi untuk bukti transaksi, foto kegiatan bisa dilampirkan di SPJ di pelaksana kegiatan masing-masing. Jadi ada soft file sama hard file. SPJ sesuai dengan RAB.”

Desa Tebel sendiri telah melakukan Bimbingan Teknis terhadap operator Siskeudes yang dihadiri langsung oleh pemangku kewenangannya sehingga dengan harapan adanya kecakapan yang dimiliki pemangku kewenangan dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Selain itu staff di desa tebel semua berpendidikan minimal sarjana sehingga adanya kecakapan dari SDM.

“Kalau untuk bimtek dilakukan oleh kecamatan dengan diwakili dengan kaur perencanaan dan bendahara sebagai pemangku kewenangannya.”

Terkait sumber daya dalam implementasi aplikasi Siskeudes desa Tebel tidak ada permasalahan karena baik sumber daya manusia dan teknologi dan organisasional sudah berjalan dengan baik.

3. Disposisi Dalam Aplikasi SISKEUDES

Apabila pejabat pelaksana mendukung suatu kebijakan atau program, apabila perilakunya positif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, jika penempatan atau pengaturannya berdasarkan asas orang yang tepat pada tempat yang tepat, dan jika motivasi kerjanya sangat tinggi, demikian pula dengan sikap masyarakatnya, maka kebijakan atau program tersebut akan berhasil dalam pelaksanaannya.

Demikian itulah penerapan Siskeudes dapat berjalan lancar apabila penerapan mendapatkan dukungan dari segenap perangkat daerah yang ada, baik dari segi perilaku dan prosedur yang sesuai dalam mengoperasionalkan sistem ini, kemudian adanya prinsip yang mendasari yaitu *the right man in the right place* serta dorongan kepada perangkat daerah untuk mengaplikasikan SISKEUDES sesuai dengan SOP yang berlaku.

Lebih jauh, hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa bimbingan teknis mengenai aplikasi pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dirasa masih di bawah standar; pelatihan yang diberikan masih terlalu kaku untuk diterima oleh orang tua, dan pendidikan mereka masih di SMA atau SMK. Selain itu, teknologi informasi pada saat itu belum

semaju saat itu, hal ini menyebabkan penerimaan materi yang sedikit terlambat dan terkesan membosankan. Para pemangku kepentingan ini memegang peranan penting dalam membantu menilai metode pelatihan yang sebelumnya dianggap tidak fleksibel dan memodifikasinya agar lebih adaptif dan disukai oleh peserta pelatihan dari berbagai usia dan latar belakang pendidikan.

4. Struktur Birokrasi dalam aplikasi SISKEUDES

Melalui struktur birokrasi yang memegang tugas penting dalam berjalannya sebuah program kerja, pembagian tugas dan wewenang, serta koordinasi yang menciptakan keharmonisan dalam organisasi. Sama halnya dengan penerapan aplikasi pelaporan keuangan yang telah terotomatisasi ini, sistem birokrasi dirasa sangatlah penting untuk membentuk pembagian tugas dan wewenang yang adil.

Pusat belum mengatur aturan mengenai standar rekrutmen perangkat desa, daerah khususnya desa tidak bisa sembarangan melakukan rekrutmen secara terbuka, selama ini rekrutmen terbuka hanya terbatas di desa masing-masing. Hal ini menjadi acuan bagi kementerian desa untuk dapat membuat regulasi rekrutmen aparatur menggunakan sistem yang memungkinkan semua orang turut berpartisipasi, hal ini dapat memberikan kesempatan kepada anak muda untuk memberikan kontribusinya kepada daerah. Dengan adanya sistem perekrutan ini diharapkan dapat menyerap potensi-potensi yang ada di sekitar wilayah pemerintahan dan memberikan kemudahan dalam menjalankan birokrasi yang ada.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi SISKEUDES ini memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Implementasi dari SISKEUDES ini memungkinkan bagi pemerintah desa untuk menyusun, melaksanakan, serta melaporkan keuangan atau anggaran dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Namun, keberhasilan dari penerapan ini juga bergantung pada beberapa faktor, termasuk kecukupan sumber daya manusia, komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan, serta dukungan struktural dari birokrasi desa. Disamping keberhasilan tersebut adapun tantang yang dihadapi dalam mengimplementasikan SISKEUDES ini, seperti kurangnya

pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi para aparatur desa. Secara keseluruhan, SISKEUDES terbukti menjadi alat yang efektif dalam memperbaiki tata kelola keuangan desa, tetapi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung tetap perlu diperhatikan agar manfaat dari aplikasi ini dapat maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight bagi kebijakan pengelolaan keuangan desa di masa mendatang dan menjadi referensi bagi desa lain dalam menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763-776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Juardi, S. S. M., Muchlis, M., & Putri, A. R. (2019). Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/5159>
- Maharani, N. D., & Akbar, S. F. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(1). <https://baj.upnjatim.ac.id/index.php/baj/article/view/253>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). ALFABETA.
- Ramadhan, R. K., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3472>
- Rivan, A., & Maksum, R. I. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92-100.
- Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutojo, A. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 152-165. <https://doi.org/10.24076/JSPG.2020v2i2.416>

- Wijayandanu, A. K., & Astuti, P. (2020). Evaluasi Implementasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online di Kabupaten Pati Pada tahun 2018-2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(4), 399-410.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/28926>